

## Hadis Tematik Politik Pemerintahan

Yoan Febriawan<sup>1</sup>, Abustani Ilyas<sup>2</sup>, Tasbih<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### Histori Naskah

Diserahkan:  
January 2, 2026

Direvisi:  
April 15, 2026

Diterima:  
June 17, 2026

### ABSTRACT

*This study examines the concept of governmental politics from the perspective of the hadiths of prophet muhammad (pbuh) by employing a thematic hadith approach and analyzing the relevance and implementation of its political values within contemporary state governance. As the second primary source of islamic teachings after the qur'an, the prophetic hadith provides normative and ethical foundations concerning leadership, authority, justice, trustworthiness (amanah), consultation (shūrā), and the responsibilities of rulers toward their citizens. Through the thematic hadith approach, this study systematically compiles and analyzes hadiths related to governmental politics, thereby generating a comprehensive and holistic understanding of the subject. The findings reveal that governmental politics in islam is not perceived as a means of pursuing power, but rather as a trust that must be exercised in accordance with the principles of justice, integrity, and public welfare (maṣlahah). These values demonstrate strong relevance to contemporary governance practices, particularly in addressing issues such as corruption, abuse of power, weak bureaucratic integrity, and legal injustice. The implementation of the prophetic values contained in the hadiths can be realized through the strengthening of political ethics, the promotion of good governance, the enhancement of public participation, and exemplary leadership. Therefore, the thematic study of hadith makes a significant contribution to the formulation of a contextual and applicable islamic political ethics framework aimed at fostering a just, transparent, and welfare-oriented government.*

**Keywords** : thematic hadith, islamic governmental politics, leadership, trustworthiness, justice

### ABSTRAK

Kajian ini membahas konsep politik pemerintahan dalam perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan pendekatan hadis tematik dan menganalisis relevansi dan implementasi nilai-nilai politik pemerintahan tersebut dalam praktik kehidupan bernegara kontemporer. Hadis Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an memberikan landasan normatif dan etis mengenai kepemimpinan, kekuasaan, keadilan, amanah, musyawarah, serta tanggung jawab penguasa terhadap rakyat. Melalui pendekatan hadis tematik, penelitian ini menghimpun dan mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan politik pemerintahan secara komprehensif, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan tidak parsial. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik pemerintahan dalam Islam dipahami bukan sebagai sarana perebutan kekuasaan, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, integritas, dan kemaslahatan umum. Nilai-nilai tersebut terbukti memiliki relevansi yang kuat dengan praktik pemerintahan modern, khususnya dalam menghadapi persoalan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya integritas aparaturnegara, dan ketidakadilan hukum. Implementasi nilai-nilai profetik dalam hadis Nabi SAW dapat diwujudkan melalui penguatan etika politik, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), partisipasi publik, serta keteladanan pemimpin. Dengan demikian, kajian hadis tematik berkontribusi penting dalam merumuskan etika politik Islam yang kontekstual dan aplikatif guna mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci** : Hadis Tematik, Politik Pemerintahan Islam, Kepemimpinan, Amanah, Keadilan

**Corresponding Author** : Yoan Febriawan, e-mail: yoanfebriawan.edu@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kajian hadis tematik (*al-ḥadīth al-mawḍū'ī*) merupakan salah satu pendekatan metodologis dalam studi hadis yang menempatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dalam satu tema tertentu guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. Pendekatan ini menjadi sangat relevan ketika membahas persoalan politik pemerintahan (*al-siyāṣah al-ḥukmiyyah*), mengingat kompleksitas persoalan kekuasaan, kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab publik dalam kehidupan bernegara (Asril & Larisman, 2026). Politik pemerintahan dalam perspektif Islam tidak semata-mata dipahami sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip moral, etika, dan hukum yang bersumber dari wahyu (Huda et al., 2024). Dalam tradisi Islam, hadis Nabi SAW menempati posisi sentral sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadis tidak hanya berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga memberikan pedoman praktis dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik umat (Firdausiyah & Sofa, 2025). Oleh karena itu, pengkajian hadis tematik mengenai politik pemerintahan menjadi penting untuk menggali nilai-nilai normatif yang dapat dijadikan landasan dalam membangun sistem pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Politik pemerintahan dalam Islam memiliki karakteristik yang khas, yaitu berorientasi pada kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*) dan penegakan keadilan (*'adl*). Islam memandang kekuasaan sebagai sarana, bukan tujuan (Ramayanti et al., 2026). Kekuasaan diberikan kepada manusia agar dapat mengelola kehidupan bermasyarakat secara tertib dan adil sesuai dengan ketentuan Allah SWT (Fadloli, 2020). Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW tidak hanya berperan sebagai rasul yang menyampaikan wahyu, tetapi juga sebagai kepala pemerintahan yang mempraktikkan nilai-nilai politik Islam secara langsung dalam kehidupan masyarakat Madinah (Hamidullah, 1961). Hadis-hadis Nabi SAW banyak memuat prinsip-prinsip dasar politik pemerintahan, seperti keharusan menegakkan keadilan, larangan berbuat zalim, kewajiban menaati pemimpin selama tidak bertentangan dengan syariat, serta tanggung jawab pemimpin terhadap kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa politik dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan spiritual. Dengan demikian, kajian hadis tematik tentang politik pemerintahan bertujuan untuk merumuskan kerangka etis dan normatif bagi praktik pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam (Qardhawi, 1997).

Perkembangan zaman yang ditandai dengan dinamika politik global, tuntutan demokratisasi, serta meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap sumber-sumber ajaran Islam. Hadis tematik menjadi sarana yang efektif untuk menjawab tantangan tersebut, karena mampu menyajikan ajaran Nabi SAW secara sistematis dan relevan dengan konteks kekinian. Dalam bidang politik pemerintahan, hadis tematik dapat memberikan panduan normatif mengenai hubungan antara pemimpin dan rakyat, mekanisme pengambilan keputusan, serta batas-batas penggunaan kekuasaan. Selain itu, kajian hadis tematik juga berperan dalam meluruskan pemahaman yang keliru mengenai politik Islam. Tidak jarang, politik dipersepsikan sebagai sesuatu yang kotor dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Padahal, dalam perspektif Islam, politik justru merupakan instrumen untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Hadis-hadis Nabi SAW memberikan legitimasi dan pedoman yang jelas mengenai pentingnya pengelolaan kekuasaan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman (Auda, 2008).

Salah satu aspek utama dalam politik pemerintahan yang banyak dibahas dalam hadis adalah kepemimpinan (*al-imāmah* atau *al-qiyādah*). Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis



tentang “kullukum rā‘in wa kullukum mas’ul ‘an ra‘iyyatihi” menegaskan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan Islam (Bukhārī, 1422). Prinsip ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan hukum. Hadis-hadis tentang kepemimpinan juga menekankan pentingnya sifat amanah, kejujuran, dan kemampuan dalam mengelola urusan publik. Nabi SAW melarang seseorang yang tidak kompeten untuk memegang jabatan publik, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan dan ketidakadilan. Dengan demikian, hadis tematik mengenai kepemimpinan memberikan dasar etis bagi seleksi dan evaluasi pemimpin dalam sistem pemerintahan Islam.

Keadilan merupakan prinsip fundamental yang menjadi ruh dalam politik pemerintahan Islam. Hadis-hadis Nabi SAW secara tegas mengecam segala bentuk kezaliman, baik yang dilakukan oleh individu maupun penguasa. Dalam banyak riwayat, Nabi SAW memperingatkan bahwa kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Pesan moral ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang tidak dijalankan secara adil akan membawa konsekuensi serius, baik di dunia maupun di akhirat (al-Naisaburi, 2000). Kajian hadis tematik mengenai keadilan dalam pemerintahan menjadi sangat penting, terutama dalam konteks modern yang sering diwarnai oleh penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Hadis-hadis Nabi SAW memberikan landasan normatif untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan menjadikan keadilan sebagai prinsip utama, pemerintahan Islam diharapkan mampu menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan sejahtera (Zaidān, 1999).

Hadis tematik tentang politik pemerintahan juga membahas relasi antara pemimpin dan rakyat. Dalam Islam, hubungan ini bersifat timbal balik dan dilandasi oleh prinsip saling menasihati (naṣīḥah). Nabi SAW menegaskan bahwa agama adalah nasihat, termasuk nasihat bagi para pemimpin. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk mengingatkan pemimpin apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan (al-Naisaburi, 2000; Hakim, 2019). Di sisi lain, hadis-hadis Nabi SAW juga menekankan kewajiban rakyat untuk menaati pemimpin selama kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan ajaran Islam (Yanti, 2025). Ketaatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Dengan demikian, hadis tematik memberikan kerangka normatif mengenai keseimbangan antara ketaatan dan kritik konstruktif dalam kehidupan politik.

Dalam konteks kontemporer, kajian hadis tematik mengenai politik pemerintahan memiliki relevansi yang sangat tinggi. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sistem pemerintahan modern. Hadis tematik dapat menjadi jembatan konseptual untuk merumuskan prinsip-prinsip pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia, tanpa kehilangan identitas keislamannya (Hallaq, 1893; Itsnaini et al., 2025). Pendekatan tematik memungkinkan peneliti untuk memahami hadis secara holistik dan kontekstual, sehingga terhindar dari penafsiran yang parsial dan tekstualistik. Dengan demikian, hadis tematik tentang politik pemerintahan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan wacana politik Islam yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan hadis dengan politik dan pemerintahan dalam perspektif Islam. Penelitian oleh Itsnaini, Alif, dan Luthfi (2025) menunjukkan bahwa pendekatan hadis tematik (maudhu‘i) mampu membangun kerangka etika politik yang berorientasi pada keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab pemimpin dalam sistem ketatanegaraan modern (Itsnaini et al., 2025). Sementara itu, penelitian Huda, Sinaga, dan Ratulangi (2024) mengkaji perkembangan pemikiran politik Islam dan modern serta menegaskan bahwa nilai-nilai politik Islam tetap relevan dalam merespons tantangan



tata kelola pemerintahan kontemporer (Huda et al., 2024). Kajian lain oleh Sutriani (2011) menyoroti peran Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama sekaligus kepala negara yang berhasil mengintegrasikan dimensi spiritual dan administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan (Sutriani, 2011). Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan konsep kepemimpinan, keadilan, dan tata kelola pemerintahan dalam Islam. Namun demikian, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek politik Islam secara umum atau penerapan hadis tematik dalam bidang ketatanegaraan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji secara khusus hadis-hadis politik pemerintahan melalui pendekatan hadis tematik untuk merumuskan konsep politik pemerintahan yang komprehensif sekaligus menganalisis relevansi implementatifnya dalam konteks pemerintahan modern..

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa hadis-hadis nabi muhammad saw yang berkaitan dengan politik pemerintahan, seperti kepemimpinan, amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab penguasa terhadap rakyat. Penelitian dilakukan melalui metode hadis tematik (*al-ḥadīth al-mawḍūʿī*), yaitu menghimpun hadis-hadis yang memiliki tema serupa dari berbagai sumber hadis primer, kemudian mengelompokkan, mengkaji, dan menganalisisnya secara komprehensif untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep politik pemerintahan dalam islam. Sumber data primer penelitian ini berasal dari kitab-kitab hadis *muʿtabarah*, terutama ṣaḥīḥ al-bukhārī dan ṣaḥīḥ muslim, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan literatur yang membahas hadis, politik islam, serta tata kelola pemerintahan dalam perspektif islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi hadis-hadis yang relevan dengan tema politik pemerintahan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik. Tahapan analisis meliputi identifikasi tema, pemahaman konteks hadis, interpretasi kandungan makna, serta pengaitan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis dengan realitas pemerintahan kontemporer (Ismail, 2015). Untuk menjaga validitas kajian, peneliti melakukan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai literatur hadis, syarah hadis, dan kajian akademik terkait politik islam. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai konsep politik pemerintahan dalam hadis nabi saw serta relevansi implementasinya dalam kehidupan bernegara modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Politik Pemerintahan dalam Perspektif Hadis

Secara terminologis, politik dalam Islam sering dikaitkan dengan istilah *siyāsah*, yang berarti pengaturan urusan umat dengan cara yang membawa kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Iqbal, 2016). Politik pemerintahan dalam perspektif Islam bukanlah wilayah yang bebas nilai, tetapi terikat oleh prinsip-prinsip syariah. Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan di Madinah telah memberikan teladan nyata bagaimana kekuasaan dijalankan berdasarkan wahyu, akhlak, dan keadilan (Sutriani, 2011). Dalam hadis-hadis Nabi SAW, politik pemerintahan digambarkan sebagai amanah. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa, melainkan kewajiban moral dan spiritual.

a. Kepemimpinan sebagai Amanah

Salah satu hadis fundamental dalam konsep politik pemerintahan adalah hadis tentang kepemimpinan sebagai amanah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كَلِّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَإِلِمَامٌ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Hadis ini menegaskan bahwa seorang imam atau pemimpin pemerintahan bertanggung jawab penuh atas rakyat yang dipimpinnya (al-Naisaburi, 2000). Konsep amanah ini menjadi fondasi utama politik pemerintahan dalam Islam, yang menuntut pemimpin untuk menjalankan kekuasaan secara jujur, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

b. Prinsip Keadilan dalam Pemerintahan

Keadilan merupakan prinsip sentral dalam politik pemerintahan Islam. Nabi Muhammad SAW menegaskan keutamaan pemimpin yang adil melalui hadis:

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pemimpin yang adil mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah SWT (Taimiyah, 1998). Keadilan dalam konteks pemerintahan mencakup keadilan hukum, ekonomi, sosial, dan politik, tanpa diskriminasi berdasarkan status, suku, atau golongan.

c. Larangan Penyalahgunaan Kekuasaan

Hadis Nabi SAW juga memberikan peringatan keras terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam salah satu hadis disebutkan:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Hadis ini menegaskan bahwa pengkhianatan terhadap amanah kekuasaan merupakan dosa besar dengan konsekuensi ukhrawi yang berat (Almawardi, 1994). Oleh karena itu, politik pemerintahan dalam Islam harus dijalankan dengan integritas dan transparansi.

d. Musyawarah dalam Pengambilan Kebijakan

Prinsip musyawarah (sh ūrā) juga ditegaskan dalam praktik Nabi SAW sebagai kepala pemerintahan. Meskipun beliau menerima wahyu, dalam banyak urusan sosial dan politik Nabi tetap bermusyawarah dengan para sahabat. Hadis-hadis yang menjelaskan praktik ini menunjukkan bahwa politik pemerintahan Islam bersifat partisipatif dan tidak otoriter (Qardhawi, 1997).

## B. Relevansi dan Implementasi Nilai-Nilai Politik Pemerintahan Dalam Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki peran fundamental dalam membentuk pandangan hidup umat Islam, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Dalam kajian hadis tematik (maudhu'i), hadis tidak hanya dipahami secara parsial, melainkan dikaji berdasarkan tema tertentu untuk menggali nilai-nilai normatif dan aplikatif yang relevan dengan kehidupan modern. Politik pemerintahan dalam Islam tidak semata-mata dimaknai sebagai perebutan kekuasaan, melainkan sebagai amanah untuk mengelola urusan publik demi terwujudnya keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara kontemporer, nilai-nilai politik pemerintahan yang terkandung dalam hadis Nabi SAW menjadi sangat relevan untuk dijadikan landasan etik dan moral dalam penyelenggaraan negara. Tantangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan hukum, dan lemahnya integritas aparatur negara menunjukkan pentingnya revitalisasi nilai-nilai profetik dalam praktik pemerintahan modern. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menjelaskan relevansi dan implementasi nilai-nilai

politik pemerintahan dalam hadis Nabi SAW terhadap praktik pemerintahan dalam kehidupan bernegara kontemporer secara sistematis dan saling berhubungan.

Konsep Politik Pemerintahan dalam Perspektif Hadis Dalam hadis Nabi SAW, politik pemerintahan (siyasah) dipahami sebagai upaya mengatur dan mengurus kepentingan umat dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan. Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab besar, baik di hadapan manusia maupun Allah SWT. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki dimensi spiritual dan sosial sekaligus. Seorang pemimpin dituntut untuk menjalankan kekuasaan secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam konteks pemerintahan, hadis ini menjadi dasar etis bahwa pejabat negara harus mengedepankan kepentingan rakyat dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Nilai Keadilan sebagai Pilar Utama Pemerintahan Keadilan merupakan nilai sentral dalam politik pemerintahan Islam sebagaimana tercermin dalam banyak hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya orang-orang yang adil kelak di sisi Allah berada di atas mimbar dari cahaya” (Asshiddiqie, 2006). Hadis ini menunjukkan kedudukan mulia bagi pemimpin yang menegakkan keadilan dalam setiap kebijakan dan keputusan. Dalam konteks bernegara kontemporer, nilai keadilan relevan dengan prinsip supremasi hukum (rule of law), persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Implementasi nilai keadilan dalam hadis dapat diwujudkan melalui sistem hukum yang independen, transparan, dan tidak diskriminatif. Pemerintahan yang adil akan menciptakan kepercayaan publik dan stabilitas sosial.

Nilai Amanah dan Tanggung Jawab Kekuasaan Amanah merupakan nilai fundamental dalam hadis Nabi SAW yang berkaitan langsung dengan praktik pemerintahan. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah.” Hadis ini menegaskan bahwa amanah adalah bagian integral dari keimanan, termasuk dalam menjalankan kekuasaan dan jabatan publik. Dalam praktik pemerintahan modern, nilai amanah tercermin dalam integritas pejabat negara, pengelolaan keuangan publik yang bersih, serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Implementasi nilai amanah menjadi dasar dalam upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Hamidullah, 1961).

Nilai Musyawarah dalam Pengambilan Keputusan Hadis Nabi SAW juga menekankan pentingnya musyawarah (syura) dalam pengambilan keputusan. Rasulullah SAW dikenal sebagai pemimpin yang senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan publik, sebagaimana tercermin dalam berbagai peristiwa strategis kenegaraan di Madinah (Iqbal, 2016). Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur’an dan diperkuat oleh praktik Nabi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam konteks pemerintahan kontemporer, nilai musyawarah relevan dengan prinsip demokrasi, partisipasi publik, dan keterbukaan. Implementasi nilai ini dapat dilakukan melalui mekanisme perwakilan rakyat, dialog publik, dan pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

Nilai Kesederhanaan dan Keteladanan Pemimpin Rasulullah SAW memberikan teladan kepemimpinan yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Dalam berbagai hadis dijelaskan bahwa Nabi hidup dengan penuh kesederhanaan meskipun memiliki kekuasaan sebagai kepala negara Madinah (Hafidhuddin, 2014). Nilai ini mengajarkan bahwa pemimpin tidak boleh terjebak dalam gaya hidup mewah yang menjauhkan diri dari realitas rakyat. Dalam praktik pemerintahan modern, nilai kesederhanaan dan keteladanan pemimpin dapat meningkatkan kepercayaan publik dan moral aparaturnya. Pemimpin yang menjadi teladan akan



mendorong terciptanya budaya birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Relevansi Hadis Politik Pemerintahan dalam Negara Modern Meskipun hadis Nabi SAW lahir dalam konteks masyarakat Madinah abad ke-7, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal dan kontekstual. Prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan tanggung jawab kekuasaan tetap relevan dalam sistem negara modern, baik yang berbentuk negara demokrasi maupun negara hukum.

Relevansi ini menunjukkan bahwa hadis tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kenegaraan kontemporer, melainkan dapat menjadi sumber etika politik yang memperkaya praktik pemerintahan. Nilai-nilai profetik dalam hadis dapat berfungsi sebagai moral compass bagi penyelenggara negara. Implementasi Nilai Hadis dalam Praktik Pemerintahan Kontemporer Implementasi nilai-nilai politik pemerintahan dalam hadis Nabi SAW dapat dilakukan melalui internalisasi etika profetik dalam sistem pemerintahan. Pendidikan karakter bagi aparatur negara, reformasi birokrasi, serta penegakan hukum yang berkeadilan merupakan bentuk konkret implementasi nilai hadis dalam kehidupan bernegara. Selain itu, nilai-nilai tersebut juga dapat menjadi landasan moral dalam penyusunan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*). Dengan demikian, hadis tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga aplikatif dalam konteks pemerintahan modern.

Relevansi nilai-nilai politik pemerintahan yang terkandung dalam hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa ajaran hadis tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kenegaraan kontemporer, seperti negara hukum, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebaliknya, hadis justru memberikan fondasi etika politik yang bersifat universal, meliputi keadilan, amanah, tanggung jawab, dan musyawarah, yang sangat dibutuhkan dalam praktik pemerintahan modern. Nilai-nilai profetik tersebut berfungsi sebagai *moral compass* bagi penyelenggara negara agar kekuasaan tidak dijalankan secara pragmatis dan bebas nilai, melainkan tetap berorientasi pada kemaslahatan rakyat dan keadilan social. Implementasi nilai hadis dalam praktik pemerintahan kontemporer menuntut adanya internalisasi etika profetik ke dalam sistem dan budaya birokrasi. Hal ini dapat diwujudkan melalui pendidikan karakter bagi aparatur negara, reformasi birokrasi yang menekankan integritas dan akuntabilitas, serta penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Selain itu, nilai-nilai hadis dapat dijadikan landasan moral dalam perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*). Dengan demikian, hadis Nabi SAW tidak hanya dipahami secara normatif dan teologis, tetapi juga memiliki fungsi praktis dan aplikatif dalam memperkaya etika pemerintahan dan memperkuat kualitas penyelenggaraan negara modern.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai politik pemerintahan yang terkandung dalam hadis Nabi SAW memiliki relevansi yang kuat dengan praktik pemerintahan dalam kehidupan bernegara kontemporer. Nilai keadilan, amanah, musyawarah, tanggung jawab, dan keteladanan pemimpin merupakan prinsip universal yang dapat diimplementasikan dalam sistem pemerintahan modern. Kajian hadis tematik menjadi pendekatan penting untuk menggali dan mengontekstualisasikan nilai-nilai tersebut agar dapat berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

## PENUTUP

Konsep politik pemerintahan dalam perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW, berdasarkan pendekatan hadis tematik (*maudhu'i*), menegaskan bahwa kekuasaan dan kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah yang sarat dengan tanggung jawab moral dan spiritual. Melalui pengumpulan dan analisis hadis-hadis tentang kepemimpinan, keadilan, amanah, larangan penyalahgunaan kekuasaan, serta musyawarah, dapat dipahami



bahwa politik pemerintahan Islam tidak bersifat bebas nilai, melainkan terikat pada prinsip-prinsip syariah dan akhlak. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan konkret sebagai pemimpin yang menjalankan kekuasaan secara adil, jujur, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga pendekatan hadis tematik memungkinkan perumusan konsep politik pemerintahan Islam secara komprehensif dan sistematis.

Nilai-nilai politik pemerintahan yang terkandung dalam hadis Nabi SAW memiliki relevansi yang kuat dan aplikatif dalam praktik pemerintahan dalam kehidupan bernegara kontemporer. Prinsip keadilan, amanah, musyawarah, tanggung jawab kekuasaan, serta keteladanan pemimpin sejalan dengan tuntutan negara modern, seperti supremasi hukum, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Implementasi nilai-nilai profetik tersebut dapat menjadi landasan etika politik dalam menghadapi persoalan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan krisis integritas aparatur negara, sehingga hadis Nabi SAW berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus moral dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan bersih.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Naisaburi, I. A. al-H. M. bin M. bin K. al-Qusyairi. (2000). *Shahih Muslim* (Vol. 1). Jam'iyah al-Maktab al-Islamiyah.
- Almawardi. (1994). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Fikr.
- Asril, A., & Larisman, L. (2026). Politik Kekuasaan dan Keadilan Sosial: Hubungan Antara Kepemimpinan dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Wawasan Nusantara*, 2(2), 13–17.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Konstitusi Press.
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Bukhārī, M. ibn I. al-. (1422). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. al-Ṭab'ah al-Sultāniyyah. <https://shamela.ws/book/1681>
- Fadloli, Z. M. (2020, August 27). Adil Bermasyarakat Bernegara. *Muhammadiyah*. <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/adil-bermasyarakat-bernegara/>
- Firdausiyah, J., & Sofa, A. R. (2025). Relevansi Al-Qur'an dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, dan Pengambilan Keputusan di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 102–131. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i1.872>
- Hafidhuddin, D. (2014). *Kepemimpinan Islami*. Gema Insani.
- Hakim, M. S. (2019, April 12). Hak dan Kewajiban Pemimpin dan Rakyat yang Dipimpin (Bag. 1). *Muslim.or.id*. <https://muslim.or.id/46134-hak-dan-kewajiban-pemimpin-dan-rakyat-yang-dipimpin-bag-1.html>
- Hallaq, W. B. (1893). *Islam, Politics, and Modernity's Moral Predicament*. Columbia University Press.
- Hamidullah, M. (1961). *The Muslim Conduct of State*. Ashraf Press.
- Huda, K., Sinaga, A. S., & Ratulangi, D. (2024). Pemikiran Politik Islam dan Modern. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(3), 244–254. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i3.8103>
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia.
- Ismail, N. (2015). *Metode Penelitian untuk Studi Islam Panduan Praktis dan Diskusi Isu*. Samudera Biru.



- Itsnaini, S., Alif, M., & Luthfi, H. (2025). Penerapan Studi Hadis Tematik di Bidang Politik dan Ketatanegaraan. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(3), 238–250. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i3.2615>
- Qardhawi, Y. (1997). *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Dar al-Shuruq.
- Ramayanti, R., Nuha, M. L., & Antasari, R. (2026). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Islam dan Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 1045–1053. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v4i1.1763>
- Sutriani, S. (2011). Muhammad Sebagai Pemimpin Agama dan Kepala Negara. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 6(2), 149–155. <https://doi.org/10.24252/.v6i2.1413>
- Taimiyah, I. (1998). *Al-Siyāsah al-Shar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Yanti, D. (2025). Hadis Kepemimpinan: Apakah Boleh Tidak Taat Pemimpin? *Al-Thiqah: Journal of Hadith and Prophetic Tradition*, 5(1), 24–28.
- Zaidān, ‘Abd al-Karīm. (1999). *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Mu’assasah al-Risālah.

